

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan penelitian, meliputi :

1. Rizqi Rolando Kansil (2015)

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: Apakah pencatatan dan pelaporan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Jaya Abadi Manado telah sesuai dengan UU Nomor. 42 tahun 2009. Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Jaya Abadi Manado. Sedangkan jadwal penelitian ini dilaksanakan selama bulan april 2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPN pada PT. Jaya Abadi Manado masih terdapat kesalahan pencatatan dimana biaya pemeliharaan kendaraan seharusnya perusahaan memasukan biaya ini kedalam kategori biaya yang pajak masukannya dapat dikreditkan, Karena pajak masukan atas pemeliharaan kendaraan berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan dalam menjual barang kena pajak. Diperlukan adanya peningkatan kualitas dan jumlah SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi perpajakan yang sesuai dan pengadaan sosialisasi serta bimbingan teknik sehingga dapat menghasilkan pencatatan PPN yang lebih baik dan sesuai dengan UU. No 42. Tahun 2009.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rizqi Rolando Kansil (2013) terletak pada pembahasan yaitu tentang Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rizqi Rolando Kansil (2013) terletak pada objek penelitian yaitu PT. Jaya Abadi Manado sedangkan penelitian ini pada PT. Terminal Petikemas Surabaya. Selain itu sumber data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data sekunder, sedangkan penelitian ini juga menggunakan data primer. Terdapat tax treaty dalam penelitian ini.

2. Mayazitha Reggina Geruh (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan UU Nomor. 42 tahun 2009 pada PT. Tiga Karya Wenang Manado. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Tiga Karya Wenang Manado. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Dari hasil penelitian pada PT. Tiga Karya Wenang Manado merupakan perusahaan yang bergerak disegala bidang menjual produk yang merupakan Barang Kena Pajak. Sebagai Pengusaha kena pajak PT Tiga Karya Wenang wajib melaksanakan penerapan PPN sesuai dengan UU. Dalam penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada perusahaan tersebut sudah sesuai dengan UU Nomor. 42 tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM. Dimana tarif yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak 10% dari harga jual produk. Yang menjadi Dasar Pengenaan PPN pada PT. Tiga Karya Wenang Manado adalah harga jual produk yang dalam perusahaan lebih dikenal dengan istilah

Harga Pengikatan. Perusahaan menggunakan metode pencatatan PPN yaitu metode Akrua Basis. Pelaksanaan, pemungutan dan perhitungan PPN yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak sudah benar.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Mayazitha Reggina Geruh (2013) terletak pada pembahasan yaitu tentang Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu metode penelitian yang dilakukan yaitu metode analisis deskriptif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mayazitha Reggina Geruh (2013) terletak pada data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data primer serta, sedangkan penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Selain itu objek penelitian yaitu PT. Tiga Karya Wenang Manado, sedangkan penelitian ini pada PT. Terminal Petikemas Surabaya. Terdapat tax treaty dalam penelitian ini.

3. Cindy R.E Lulu (2013)

Tujuan Objek penelitian ini adalah perusahaan PT. Agung Utara Sakti Manado perusahaan yang berdiri pada tahun 1986 yang bertempat di Jl. DR. Sutomo No.10A. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai yang ada mulai dari perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang berupa profil perusahaan serta data kuantitatif yang berupa data penjualan dan pembelian dari PT. Agung Utara Sakti Manado. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yakni wawancara serta data sekunder laporan penjualan dan pembelian dari perusahaan, serta laporan pajak pertambahan nilai (SPT Masa PPN) dari perusahaan periode 2009, 2010, dan 2011.

Hasil dari penelitian menunjukkan Bahwa Perusahaan telah menerapkan mekanisme pajak pertambahan nilai mulai dari perhitungan, penyetoran, sampai pelaporan setiap bulannya sesuai dengan undang-undang. Perusahaan telah melaporkan seluruh pengkreditan pajak keluaran dan pajak masukan dengan menggunakan SPT Masa PPN dan dalam bentuk formulir 1111 beserta lampiran SPT Masa PPN dan tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Cindy R.E Lالujan (2013) terletak pada pembahasan yaitu tentang Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif dan menggunakan data primer serta data sekunder sebagai sumber data penelitian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Cindy R.E Lالujan (2013) terletak pada objek penelitian yaitu PT. Agung Utara Sakti Manado, sedangkan penelitian ini pada PT. Terminal Petikemas Surabaya. Terdapat tax treaty dalam penelitian ini.

4. Steffi Desanly (2013)

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengevaluasi Pajak Pertambahan Nilai yang ada di PT. Metro Batavia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Metro Batavia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian pada PT. Metro Batavia menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai sesuai

dengan tarif dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yaitu sebesar 10%. Yang menjadi dasar perhitungan PPN pada PT. Metro Batavia yaitu fares penerbangan. Laba atau rugi perusahaan nantinya dapat dihitung jika kita menghitung total fare (pendapatan jasa perusahaan) pada suatu rute penerbangan kemudian dikurangi dengan biaya operasional yang dikeluarkan, barulah kita mengetahui laba atau rugi perusahaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Steffi Desanly (2013) terletak pada pembahasan yaitu tentang Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu teknik analisis data yaitu menggunakan analisis deskriptif dan menggunakan jenis data primer maupun sekunder.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Steffi Desanly (2013) terletak pada objek penelitian yaitu PT. Metro Batavia sedangkan penelitian ini pada PT. Terminal Petikemas Surabaya. Terdapat tax treaty dalam penelitian ini.

5. Priancka Ida Cahya Posumah (2013)

Penelitian ini dilakukan di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Manado. Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti untuk mengevaluasi proses pemungutan atas Pajak Pertambahan Nilai pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Manado telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Berdasarkan pada hasil evaluasi berupa wawancara dan observasi serta analisis di dalam pembahasan ini maka pada PT Telkom Manado dapat diketahui bahwa pemungutan, pelaporan, dan penyetoran SPT Masa PPN telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dimana pemungutan PPN pada PT Telkom Manado adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau yang seharusnya ditagih. Pelaporan dan penyetoran pajak pertambahan nilai (PPN) dengan menggunakan SPT Masa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagai ketentuan umum dan tata cara perpajakan secara benar dan diakui oleh Direktur Jenderal Pajak dan telah dilaporkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setelah akhir masa pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Priancka Ida Cahya Posumah (2013) terletak pada pembahasan yaitu tentang Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan menggunakan jenis data primer maupun sekunder.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Priancka Ida Cahya Posumah (2013) terletak pada objek penelitian yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Manado, sedangkan penelitian ini pada PT. Terminal Petikemas Surabaya. Terdapat tax treaty dalam penelitian ini.

2.2 Landasan Teori

Dalam landasan teori akan diuraikan teori – teori yang berkaitan dan mendasari penelitian ini.

2.2.1 **Pengertian Pajak**

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan pengertian tersebut kemudian disempurnakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

2.2.2 **Fungsi Pajak**

Menurut Siti Resmi (2014:3) sebagai telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. **Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)**

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak

melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai contoh: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah agar rakyat mengurangi gaya hidup mewah.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2014: 11) dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.4 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Waluyo (2011:3) memberikan pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

2.2.5 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Resmi (2015:1) dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000, dan terakhir UU No. 42 Tahun 2009.

2.2.6 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Resmi (2015:5) PPN merupakan pajak tidak langsung yang berarti beban pajak bisa digeser ke pembeli. Dalam PPN, subjek pajak meliputi:

- 1. Pengusaha kena pajak.** Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009. Pengusaha yang

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan kriteria pengusaha kecil tidak wajib menjadi pengusaha kena pajak, kecuali memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Pengusaha kecil (menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 197/PMK.03/2013 merupakan pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

PPN terutang pada saat subjek pajak:

- a. PKP melakukan penyerahan Barang Kena Pajak;
- b. PKP melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. PKP melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud;
- d. PKP melakukan ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud;
- e. PKP melakukan Jasa Kena Pajak.

Kepada pengusaha kena pajak tersebut diwajibkan memungut pajak terutang; menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang masih terutang; dan melaporkan perhitungan pajak.

2. Bukan pengusaha kena pajak. PPN tetap terutang meskipun yang melakukan kegiatan bukan PKP. Bukan PKP wajib melakukan pemungutan PPN, dalam hal terdapat kegiatan sebagai berikut:

- a. Impor Barang Kena Pajak;
- b. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

- c. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- d. Membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- e. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

2.2.7 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2013:303) PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah: a) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP; b) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud; c) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan d) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor BKP.
3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah: a) Jasa yang diserahkan merupakan JKP; b) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan c) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor BKP Berwujud oleh Pegusaha Kena Pajak;
7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
8. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain;
9. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

2.2.8 Penyerahan Terutang PPN

Menurut Siti Resmi (2015:9) penyerahan yang terutang PPN dikelompokkan menjadi:

1. **Ekspor**, terdiri atas setiap kegiatan menyerahkan Barang Kena Pajak berwujud/Barang Kena Pajak tidak berwujud/Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh pengusaha kena pajak. Atas ekspor tersebut terutang PPN dan PPnBM dengan tarif 0% (nol persen).
2. Penyerahan dalam negeri, terdiri atas:
 - a. **Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri**, merupakan PPN atas penyerahan BKP/JKP di dalam Daerah Pabean/di dalam negeri selain kepada Pemungut PPN.
 - b. **Penyerahan yang PPN-nya Dipungut oleh Pemungut PPN**, merupakan penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN. Atas penyerahan ini PPN langsung dipungut oleh pembeli, yang disebut

sebagai Pemungut PPN. Ketentuan PPN oleh Pemungut PPN dibahas dalam bagian tersendiri.

c. Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut. Penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipungut meliputi (Sukardji, 2014):

- 1) Impor BKP tertentu yang dibebaskan dari Bea Masuk dan dibebaskan PPN (PMK Nomor 616/PMK.03/2004);
- 2) Pelaksanaan proyek milik Pemerintah yang dananya berasal dari hibah atau pinjaman dari luar negeri (KMK Nomor 239/KMK.01/1996);
- 3) Impor barang operasional oleh mitra kerja Pertamina untuk membangun kilang (KMK Nomor 1447/KMK.013/1990);
- 4) Impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (PMK Nomor 20/PMK.010/ 2005);
- 5) Kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) (PMK Nomor 20 Tahun 2000).

d. Penyerahan yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN. Jenis BKP dan JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN meliputi:

- 1) Impor dan/atau penyerahan BKP/JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN (sesuai PP No. 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2003).
- 2) Impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN (PP No. 12 Tahun 2001 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 46 Tahun 2003).

- 3) Pemberian restitusi atau pembebasan PPN dan/atau PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional serta Pejabat atau Tenaga Ahlinya (sesuai UU No. 1 Tahun 1982 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.01/98 yang diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-10/PJ.52/98).

2.2.9 Penyerahan Tidak Terutang PPN

Menurut Siti Resmi (2015:14) penyerahan yang tidak terutang PPN, merupakan penyerahan bukan BKP dan/atau bukan JKP. Tidak termasuk penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut dan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

2.2.10 Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut Waluyo (2012:304) Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM. Dari uraian tersebut bahwa Barang Kena Pajak dipersyaratkan:

1. Barang berwujud atau barang tidak berwujud (Merek Dagang, Hak Paten, Hak Cipta, dan lain-lain);
2. Dikenakan pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian batasan Barang Kena Pajak tidak dikaitkan dengan proses pengolahan (fabrikasi). Oleh karena itu, pengertian menghasilkan tidak berkaitan dengan penentuan barang terutang PPN atau tidak, tetapi mempunyai

hubungan dengan subjek pajak. Dalam pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang memberikan peluang pengaturan tentang jenis-jenis barang yang tidak dikenakan PPN meliputi:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumber jenisnya seperti minyak mentah (*crude oil*), gas bumi, pasir dan kerikil, bijih besi, bijih timah, dan bijih emas.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Tidak dikenakannya inilah untuk menghindarkan pajak berganda karena telah ditetapkan sebagai objek pajak daerah.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

2.2.11 Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut Waluyo (2012:304) Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang kena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM. Batasan tersebut diatas mengandung makna bahwa semua jenis jasa dapat dikenakan pajak, kecuali ditetapkan sebaliknya. Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN dan PPnBM telah menetapkan jenis jasa yang tidak dikenai PPN yaitu jasa tertentu dalam kelompok jasa berikut:

1. Jasa pelayanan kesehatan medik;
2. Jasa pelayanan sosial;
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko;
4. Jasa keuangan;
5. Jasa asuransi;
6. Jasa keagamaan;

7. Jasa pendidikan;
8. Jasa kesenian dan hiburan;
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
11. Jasa tenaga kerja;
12. Jasa perhotelan;
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
14. Jasa penyediaan tempat parkir;
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
17. Jasa boga atau catering.

2.2.12 Saat Penyetoran dan Pelaporan PPN

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan Sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Penyetoran PPN dilakukan dengan menggunakan formulir surat setoran pajak (Siti Resmi, 2015:21).

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) (Siti Resmi, 2015:21).

2.2.13 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN menurut Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 sebagai berikut (Siti Resmi, 2015:22):

1. Tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif 10% dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean/impur BKP/penyerahan JKP di dalam daerah pabean/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean/pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen)

Tarif 0% dikenakan atas ekspor BKP berwujud/ekspor BKP tidak berwujud/ekspor Jasa Kena Pajak. Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, pajak yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

2.2.14 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN. Dasar Pengenaan Pajak terdiri atas (Siti Resmi, 2015:22):

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan BKP, tidak termasuk PN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
3. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan undang-undang PPN.
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai Lain adalah jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Nilai lain tersebut ditetapkan sebagai berikut (Peraturan Menteri Keuangan Nomor.38/PMK.011/2013).

2.2.15 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Resmi (2015:25) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar dengan dasar pengenaan pajak. Hitungan tersebut diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Perhitungan PPN dibedakan menjadi dua, yaitu menghitung PPN secara final dan menggunakan kredit pajak masukan. Menghitung PPN secara final artinya tidak

diperbolehkan untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Perhitungan seperti ini dilakukan oleh:

1. Pengusaha jasa pengiriman paket.
2. Pengusaha biro perjalanan atau pengusaha jasa biro pariwisata.
3. Pengusaha pabrikan emas.
4. Pengusaha jasa perguruan transportasi.

2.2.16 PPN Kurang/Lebih Disetor

Menurut Siti Resmi (2015:25) Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean wajib membayar pajak pertambahan nilai dan berhak atas bukti pungutan pajak. Pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan pajak masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak.

$$\text{PPN}_{\text{kurang (lebih) disetor}} = \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}$$

Pajak (PPN) Keluaran merupakan PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP. Pajak (PPN) Masukan adalah PPN yang dibayar oleh PKP karena impor

BKP/perolehan BKP/penerimaan JKP/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean/pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.

2.2.17 Restitusi

Pasal 9 ayat (4a) UU PPN menyebutkan bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Kelebihan Pajak Masukan juga dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi) pada akhir tahun buku (Siti Resmi, 2015:43).

2.2.18 Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Faktur Pajak mempunyai fungsi sebagai berikut (Siti Resmi, 2015:48):

1. Sebagai bukti pungut PPN yang dibuat oleh PKP atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, baik karena penyerahan BKP atau JKP maupun impor BKP.
2. Sebagai bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh pembeli BKP atau penerima JKP kepada PKP atau Direktorat Bea dan Cukai.
3. Sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan.

Faktur pajak dibuat pada (Mardiasmo, 2013:310):

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat (Mardiasmo, 2013:311):

1. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
2. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
4. PPN yang dipungut;
5. PPnBM yang dipungut;
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

PER-24/PJ/2012 mengatur tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Pasal 3 menjelaskan bahwa bentuk dan ukuran Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan PKP. Pasal 4 menyebutkan bahwa pengadaan Faktur Pajak dilakukan oleh PKP. Serta Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing yaitu lembar ke-1 disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak., lembar ke-2, untuk arsip PKP yang menerbitkan Faktur Pajak. Dalam hal Faktur Pajak dibuat lebih dari yang ditetapkan maka harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan.

Pasal 6 menjelaskan bahwa Faktur Pajak wajib diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya. Jika tidak maka dianggap Faktur Pajak Tidak Lengkap. Alamat harus diisi sesuai dengan alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya. Jenis barang atau jasa harus diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan. Dalam hal diperlukan, PKP dapat menambahkan keterangan lain dalam Faktur Pajak. Pasal 7 menyebutkan PKP harus membuat

Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu : 2 (dua) digit Kode Transaksi; 1 (satu) digit Kode Status; dan 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 8 menjelaskan PKP mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan Password yang harus diisi dengan lengkap dan disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan. Setelah memenuhi persyaratan maka Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan dikirim melalui pos dalam amplop tertutup ke alamat PKP serta mengirimkan Password melalui surat elektronik (email) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password. Pasal 9 menjelaskan PKP menyampaikan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang harus diisi secara lengkap dan disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan. Setelah memenuhi persyaratan maka Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak.

2.2.19 Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo 2013: 37).

2.2.20 Fungsi Surat Setoran Pajak

SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi (Mardiasmo 2013: 37).

2.2.21 Batas Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:38) batasan waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagai berikut:

1. Pembayaran Masa. PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
3. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.

2.2.22 Pengertian Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo 2013: 31).

2.2.23 Fungsi Surat Pemberitahuan

Menurut Mardiasmo (2013:31) fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban; dan/atau
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.2.24 Jenis Surat Pemberitahuan

Menurut Mardiasmo (2013:34) secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahunan Pajak.

Menurut Mardiasmo (2013:34) Surat Pemberitahuan (SPT) juga dapat dalam bentuk:

- a. Formulir kertas (*hardcopy*); atau
- b. *e*-SPT.

2.2.25 Batas Waktu Penyampaian SPT

Menurut Mardiasmo (2013:35) batasan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

2.2.26 Pengertian Electronic Surat Pemberitahuan (e-SPT)

Menurut Liberti Pandiangan (2008:35) mendefinisikan *e*-SPT sebagai penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan

menggunakan media komputer. Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat.

Menurut Liberti Pandiangan (2008:37) *e-SPT PPN* pada dasarnya sama dengan *e-SPT PPH*. Fasilitas *e-SPT PPN* sebagai berikut:

1. Perekaman data SPT beserta lampirannya, yang menyediakan fasilitas perekaman data SPT dan lampirannya, dan melakukan perhitungan-perhitungan secara otomatis pada saat perekaman serta sinkronisasi data lampiran dan SPT induk;
2. Perekaman data SPT pembetulan beserta lampirannya, yang menyediakan fasilitas untuk melakukan perekaman SPT pembetulan;
3. User profiles, yang memiliki kemampuan untuk mengatur profil masing-masing pengguna sesuai dengan tanggung jawabnya;
4. Memelihara data Wajib Pajak lawan transaksi, yang memiliki fasilitas untuk merekam dan memelihara data Wajib Pajak lawan transaksinya;
5. Impor data lampiran, yang memiliki fasilitas untuk mengimpor data Faktur Pajak dengan format tertentu, yang dihasilkan oleh system yang digunakan Wajib Pajak atau data Faktur Pajak hasil ekspor dari terminal system *e-SPT* lainnya;
6. Generate data digital SPT, yang memiliki fasilitas untuk menghasilkan data digital SPT yang nantinya akan diberikan KPP dalam bentuk disket ataupun dikirimkan secara online melalui fasilitas yang disediakan DJP; dan
7. Cetak SPT, yang memiliki kemampuan untuk melakukan pencetakan SPT induk baik SPT induk PPN ataupun SPT induk PPnBM.

2.2.27 Manfaat *e-SPT*

Menurut Liberti pandiangan (2008:38) Dengan adanya modernisasi pajak dan reformasi pelayanan perpajakan serta *e-SPT* sebagai salah satunya, maka *e-SPT* sebagai program aplikasi yang berguna untuk mempermudah wajib dalam perpajakannya memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan internet.
2. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.

3. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, dimana tidak adanya formulir lampiran yang terlewatkan, karena penomoran formulir yang *prenumbered* dengan menggunakan sistem komputer.
4. Penggunaan kertas lebih efisien karena hanya mencetak SPT induk.
5. Wajib Pajak secara, cepat, tepat, dan efisien dapat menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT-nya.
6. Tidak diperlukan proses perekaman SPT beserta lampirannya di KPP karena wajib pajak telah menyampaikan datanya secara elektronik.
7. Tidak perlu antri karena dilakukan melalui internet.
8. Menghemat biaya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas bahwa dengan adanya *e*-SPT penyampaian dan perhitungan SPT dapat dilakukan dengan cepat, karena dengan media internet dan data yang disampaikan wajib pajak diproses dengan cepat dan tepat.

2.2.28 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty)

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Tujuan dari Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yaitu (www.tarif.depkeu.go.id):

1. Tidak terjadi pemajakan berganda yang memberatkan iklim dunia usaha;
2. Peningkatan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri;
3. Peningkatan sumber daya manusia;
4. Pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak;
5. Kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara.

Azas utama yang dijadikan landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Azas domisili atau azas kependudukan;
2. Azas sumber;
3. Azas nasionalitas atau azas kewarganegaraan.

Metode hak pemajakan di berbagai Negara, untuk menghindari pemajakan berganda antara lain (www.tarif.depkeu.go.id):

1. Metode Pemajakan Unilateral

Metode ini mengatur bahwa Negara Republik Indonesia mempunyai kekuatan hukum di dalamnya yang mengatur masyarakat atau badan internasional dan ditetapkan sepihak oleh Negara Indonesia sendiri, dengan kata lain tidak ada yang bisa mengatur Negara kita lain karena hal itu merupakan kewibawaan dan kedaulatan Negara kita.

2. Metode Pemajakan Bilateral

Metode ini dalam perhitungan pengenaan pajaknya harus mempertimbangkan perjanjian kedua Negara (Tax Treaty). Indonesia tidak dapat sesuka hati menerapkan jumlah pajak terutang penduduk asing atau badan internasional dua Negara yang telah mengadakan perjanjian. Justru peraturan perpajakan Indonesia tidak berlaku bilamana terdapat Tax Treaty.

3. Metode Pemajakan Multilateral

Metode ini didasarkan pada konvensi internasional yang ketentuan atau ketetapan atau keputusan yang dihasilkan untuk kepentingan banyak Negara yang ditandatangani oleh berbagai Negara, misalnya Konvensi Wina.

Metode Penghindaran Pajak Berganda adalah:

1. Pembebasan / Pengecualian;

2. Kredit Pajak;
3. Metode Lainnya.

Model Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (www.tarif.depkeu.go.id):

1. Model OECD (Organization for Economic Cooperation and Development);
2. Model UN (United Nation);
3. Model Indonesia (Gabungan antara model OECD dan UN).

2.2.29 Akuntansi Pajak

1. Pengakuan PPN

a. Pengakuan Utang PPN

PPN sebagai utang pajak dapat terjadi apabila Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak menjual Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli. Utang PPN tersebut bagi Wajib Pajak sama dengan Pajak Keluaran. Utang PPN tersebut merupakan PPN yang dibayar oleh pembeli atas pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada penjual sehingga utang PPN tersebut harus dibayar oleh penjual. Namun demikian tata cara pembayaran utang PPN tersebut dengan sebelumnya dilakukan perhitungan terhadap piutang PPN atau Pajak Masukan (Muljono dan Wicaksono, 2009: 7).

b. Pengakuan Piutang PPN

Pungutan PPN yang dilakukan oleh PKP lain pada saat Wajib Pajak membeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak diperlakukan sebagai piutang PPN atau sebagai Pajak Masukan. Terhadap piutang PPN atau pajak masukan akan dilakukan jurnal untuk mengetahui

berapa yang harus dilunasi atau berapa yang lebih bayar atas pungutan PPN pada setiap bulannya (Muljono dan Wicaksono, 2009: 11).

2. Penggolongan PPN

a. Penggolongan Utang PPN

Utang PPN identik dengan PPN keluaran yang dipungut oleh Wajib Pajak dari berbagai transaksi penjualan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Utang PPN ini dapat dijadikan satu rekening. Karena Wajib Pajak sudah mempunyai rekening utang PPN maka tidak perlu lagi membuat rekening baru untuk menampung berbagai PPN berkaitan dengan penjualan BKP maupun JKP, terkecuali Wajib Pajak melakukan berbagai transaksi yang di sana terdapat perbedaan tarif PPN dan dasar DPP (Muljono dan Wicaksono, 2009: 45).

b. Penggolongan Piutang PPN

Piutang PPN, atau identik dengan PPN masukan atau PPN yang diperoleh pada waktu pembelian BKP atau JKP oleh Wajib Pajak, pada berbagai jenis BKP maupun JKP yang dikenakan PPN pada dasarnya dapat diperlakukan sebagai kredit pajak atau sebagai piutang PPN, atau dapat pula diperlakukan sebagai biaya. Apabila PPN masukan diperlakukan sebagai piutang PPN maka sudah tidak diperlakukan lagi pembentukan rekening baru, karena pada dasarnya semua transaksi yang berkaitan dengan transaksi pembelian yang terdapat di dalam piutang PPN sudah dapat tertampung pada rekening tersebut (Muljono dan Wicaksono, 2009: 45).

c. Penggolongan Biaya PPN

Namun apabila pajak masukan sudah dijurnal sebagai piutang PPN, maka tidak dapat diperlakukan sebagai kredit pajak, sehingga harus diperlakukan sebagai biaya. Jurnalnya sebagai berikut:

| | | |
|-------------------|-----|-----|
| DPP PPN | XXX | |
| Piutang PPN | XXX | |
| Hutang dagang | | XXX |
| Biaya PPN masukan | XXX | |
| Piutang PPN | | XXX |

Biaya PPN masukan adalah PPN yang tidak diperlakukan sebagai kredit pajak, yang antara lain karena terlambat pengkreditannya, atau PPN masukan tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, dan yang lainnya. Jurnal terhadap pembelian tersebut termasuk pembelian aktiva tetap, sehingga aktiva yang diakui pada neraca adalah sebesar DPP-nya. Kalau aktiva tetap yang diakui pada neraca termasuk PPN, maka PPN tersebut akan diperlakukan sebagai biaya melalui penyusutan. Sedangkan kalau piutang PPN atas pengadaan aktiva tersebut sudah diperlakukan sebagai kredit pajak maka akan terjadi dua kali pembebanan piutang PPN, dan ini harus dilakukan koreksi fiskal (Muljono dan Wicaksono, 2009: 45).

Bagi pengusaha non-PKP, tidak dikenal piutang PPN, sehingga atas pembelian BKP atau JKP yang mengandung PPN masukan tidak akan diperlakukan sebagai kredit pajak, tetapi akan diperlakukan sebagai biaya, yang jurnalnya adalah sebagai berikut:

| | |
|---------------|-----|
| Pembelian | XXX |
| Hutang dagang | XXX |

Karena pada pembelian yang diakui Wajib Pajak non-PKP terdiri dari DPP dan PPN masukan, maka PPN masukan yang berada pada pembelian tersebut langsung diperlakukan sebagai biaya (Muljono dan Wicaksono, 2009: 46).

d. Penggolongan Pelunasan PPN

Pelunasan PPN dilakukan oleh Wajib Pajak setelah adanya perhitungan antara utang PPN dengan piutang PPN, melalui jurnal seperti berikut (Muljono dan Wicaksono, 2009: 46):

| | |
|--------------------|-----|
| Utang PPN | XXX |
| Piutang PPN | XXX |
| PPN kurang dibayar | XXX |
| PPN kurang dibayar | XXX |
| Kas/Bank | XXX |

3. Penghitungan PPN yang Harus Dibayar

a. Diperlukan Penghitungan Terlebih Dahulu

Pembayaran PPN oleh Wajib Pajak dilakukan setelah adanya penghitungan antara utang PPN dan piutang PPN. PPN yang harus dibayar oleh Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak dihitung setiap bulan, yaitu dengan menjumlah berapa utang pajak yang dimiliki, atau sama dengan Pajak Keluaran, dan menjumlah seluruh piutang PPN yang dimiliki, atau sama dengan Pajak Masukan. Selisih antara utang PPN dengan piutang PPN inilah yang akan dibayar oleh Wajib Pajak. Apabila antara utang PPN dan piutang PPN ini lebih besar piutangnya

maka akan dilakukan kompensasi atau restitusi (Muljono dan Wicaksono, 2009: 54).

b. Tidak Diperlukan Penghitungan Terlebih Dahulu

PPN yang harus dibayar oleh wajib pajak atas membangun sendiri dilakukan tanpa penghitungan utang PPN dan piutang PPN lainnya. Berapa pun besarnya PPN membangun sendiri yang terutang oleh Wajib Pajak harus dibayar (Muljono dan Wicaksono, 2009: 54).

4. Penyajian dan Pelaporan PPN

Pelaporan PPN dilakukan oleh Wajib Pajak yang sekaligus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dilakukan setiap bulan. Penyajian laporan PPN yang dilakukan setiap bulan oleh PKP tersebut dibedakan sesuai dengan cara perhitungan PPN yang harus dibayar. Bagi PKP yang penghitungan PPN-nya mempergunakan Pajak Keluaran Pajak Masukan (PKPM), maka pada laporan tersebut akan ditampilkan besarnya Pajak Keluaran (Utang PPN) dan besarnya Pajak Masukan (Piutang PPN). Besarnya PPN yang harus dibayar atau lebih dibayar merupakan selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan tersebut. Sedangkan bagi PKP yang perhitungan PPN-nya tidak mempergunakan Pajak Keluaran Pajak Masukan (PKPM), maka pada laporan tersebut tidak akan ditampilkan besarnya pajak masukan (piutang PPN). PPN yang harus dibayar atau lebih dibayar adalah sebesar peredaran usaha dikalikan 2%. Pajak masukan yang diperoleh PKP tidak diperlakukan sebagai kredit PPN maupun sebagai biaya. PKP yang tidak mempergunakan mekanisme

PKPM, penyajian laporan PPN-nya tidak dimungkinkan lebih bayar (Muljono dan Wicaksono, 2009: 58).

5. Pencatatan PPN

a. Pencatatan Utang PPN

Utang PPN terjadi apabila Wajib Pajak menjual BKP atau JKP, sehingga pada harga yang harus dibayar oleh pembeli terdapat PPN yang harus dipungut oleh Wajib Pajak. Utang PPN bagi Wajib Pajak sama dengan pajak keluaran. Jurnal transaksi dari utang PPN dapat terjadi sebagai berikut:

| | | |
|----------------|-----|-----|
| Piutang dagang | XXX | |
| DPP penjualan | | XXX |
| Utang PPN | | XXX |

Utang PPN, atau sama dengan pajak keluaran, harus diberi kode rekening tersendiri, dan tidak dapat digabungkan dengan utang PPh, karena utang PPN ini nanti dalam perhitungan akan diposting dengan piutang PPN. Apabila utang PPN ini digabung dengan rekening PPh maka pada posting itu akan terjadi kesulitan (Muljono dan Wicaksono, 2009: 37).

b. Pencatatan Piutang PPN

Piutang PPN terjadi apabila Wajib Pajak membeli BKP atau JKP sehingga pada harga yang harus dibayar terdapat PPN yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Piutang PPN bagi Wajib Pajak sama dengan pajak masukan. Jurnal transaksi dari piutang PPN dapat terjadi sebagai berikut:

| | |
|---------------|-----|
| DPP pembelian | XXX |
| Piutang PPN | XXX |
| Hutang dagang | XXX |

Piutang PPN, atau sama dengan pajak masukan, harus diberi kode rekening tersendiri, dan tidak dapat digabungkan dengan piutang PPh, karena piutang PPN ini nanti dalam perhitungannya akan diposting dengan utang PPN. Apabila piutang PPN ini digabung dengan rekening piutang PPh, dalam posting itu nanti akan mengalami kesulitan (Muljono dan Wicaksono, 2009: 37).

Menurut Waluyo (2012:332) dalam akuntansi komersial tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk PPN maupun PPnBM, PSAK hanya mengatur Akuntansi Pajak Penghasilan. Namun demikian baik dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan antara lain:

1. Akun Pajak Masukan

Untuk mencatat besarnya Pajak Masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian.

2. Akun Pajak Keluaran

Pada akun ini untuk mencatat Pajak Keluaran yang dipungut atau disetorkan ke kas Negara atas transaksi penjualan.

Terjadinya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Akun biaya yang digunakan tetap sama dengan akun yang lazim digunakan dalam akuntansi komersial. Beberapa aplikasi dalam menyusun ayat jurnal sehubungan dengan PPN:

1. Transaksi Pembelian dan Penjualan secara Tunai

Transaksi perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak

Data Pembelian BKP yang diterima langsung Faktur Pajaknya:

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Harga BKP | Rp 100.000.000,00 |
| Rabat | <u>Rp 10.000.000,00</u> |
| | Rp 90.000.000,00 |
| Potongan tunai 3% | <u>Rp 2.700.000,00</u> |
| Harga setelah potongan | Rp 87.300.000,00 |
| Pajak Pertambahan Nilai 10% | <u>Rp 8.730.000,00</u> |
| Jumlah Pembayaran Tunai | <u><u>Rp 96.030.000,00</u></u> |

Potongan tunai yang dicantumkan dalam Faktur Pajak Standar dapat mengurangi dasar pengenaan pajak PPN ayat jurnal yang disusun atas transaksi diatas.

Jurnal yang dibuat:

a. Pihak Pembeli

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| Pembelian | 87.300.000,00 | |
| | Pajak Masukan | 8.730.000,00 |
| | Kas | 96.030.000,00 |

b. Pihak Penjual

| | | |
|-----|----------------|---------------|
| Kas | 96.030.000,00 | |
| | Penjualan | 87.300.000,00 |
| | Pajak Keluaran | 8.730.000,00 |

2. Pembayaran jasa konsultan di Hong Kong sebesar US \$4.000. Kurs jual per US \$1.00 = Rp 9.200,00. Kurs Menteri Keuangan Rp 9.100,00 seperti dalam undang-undang Pemanfaatan JKP dari luar negeri atau dari luar daerah pabean terutang PPN dan terdapat juga PPh Pasal 26 sebesar 20% (untuk diperhatikan juga dalam kasus-kasus yaitu ada atau tidaknya tax treaty).

| | |
|--|--------------------------------|
| Jasa konsultan luar negeri (4.000 x Rp 9.200,00) | Rp 36.800.000,00 |
| PPh Pasal 26 (20% x \$4.000 x Rp 9.100,00) | <u>Rp 7.280.000,00</u> |
| | Rp 29.520.000,00 |
| PPN jasa luar negeri | |
| (10% x \$4.000 x Rp 9.100,00) | <u>Rp 3.640.000,00</u> |
| | <u><u>Rp 33.160.000,00</u></u> |

2.2.30 Pengertian Jasa Kepelabuhanan

Definisi Pelabuhan dan Kepelabuhanan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 pasal 1 adalah :

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
2. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban

arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

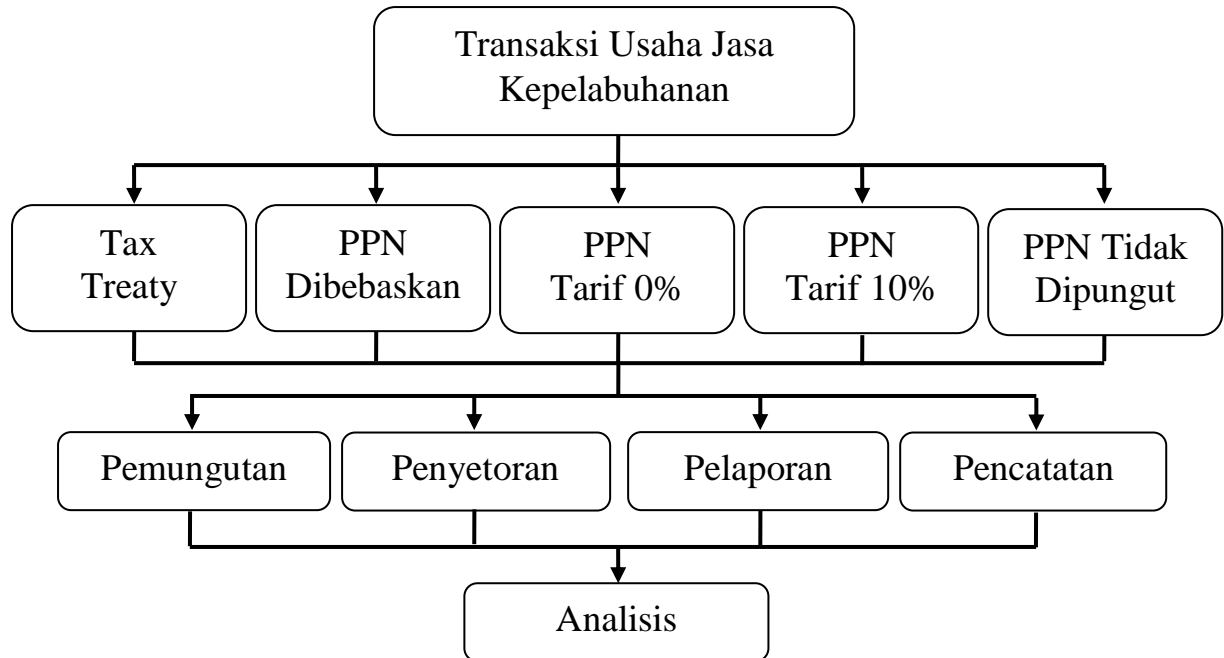
3. Terminal Kepelabuhan adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran yang ada pada penelitian ini menjelaskan tentang macam-macam jenis transaksi atas usaha Jasa Kepalabuhan, yang kemudian memahami pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas usaha tersebut. Perhitungan Pajak Pertambahan yang dimana formula perhitungannya sudah ditetapkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku dihitung berdasarkan tarif yang berlaku saat ini pada Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009. Setelah perhitungan pajak dilakukan, maka selanjutnya dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh perusahaan. Setelah itu memahami mekanisme penyetoran pajak dilakukan setiap akhir masa pajak dan peraturan penyetoran sesuai dengan peraturan perpajakan saat ini. Kemudian melakukan pelaporan pajak sebagai bukti telah melakukan pembayaran pajak. Dengan selesainya pelaporan pajak maka akan mengetahui kepatuhan pajak dari suatu Wajib Pajak beserta pencatatannya. Berdasarkan

uraian tersebut, maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian



2.4 Proposisi

Menurut Lexy Moleong (2009: 33) proposisi mengarahkan perhatian peneliti kepada sesuatu yang harus diselidiki dalam ruang lingkup studinya. Proposisi mencerminkan isi teoritis yang penting dan menyatakan kepada peneliti dimana harus mencari bukti yang relevan.

Penelitian ini berkaitan dengan analisis penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang serta peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak terjadi kesalahan pemugutan, maupun keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai agar terhindar dari sanksi yang merugikan perusahaan.